

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk¹ :

- a. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan ajang piutang.

Menurut Rifa'at Ahmad Abdul Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²

2. Jenis-jenis pembiayaan

¹ Veitzhal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta:Grafindo Persada, 2008, h. 4

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, Jakart: Gema Insani, 2001, h. 160

Sesuai dengan akadnya pengembangan produk, maka Bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya³ :

a. Pembiayaan menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau penggandaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 3) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

c. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

³ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menambah atau membuka lapangan pekerjaan baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. [enghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba

usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

4. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang.
- b. Meningkatkan daya guna suatu barang
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- d. Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
 - e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
 - f. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
 - g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
5. Prinsip-prinsip pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu⁴ :

- a. Bagi hasil atau syirkah (*profit sharing*)
 - 1) *Mudharabah*, yaitu sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan customer sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan menyediakan keahlian.
 - 2) *Musyarakah*, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikan modal berupa dana segar agar usaha customer dapat berkembang kearah yang lebih baik.
 - 3) *Al-muzaraah*, yaitu kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
 - 4) *Al-musaqah*, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* dimana penggarap tanah hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan,

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic...*h. 43

sebagai kompensasi imbalannya penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

B. Konsep Dasar *Mudharabah*

1. Pengertian

Mudharabah berasal dari akronim, “*Ad-dharbu fi’l ardhi*” bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan seiring pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi’i, *Qiradh* menurut bahasa, artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya.⁵

Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan, “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.” Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.⁶

Menurut Nabil A. Saleh, hampir seluruh aliran hukum dalam hukum Islam mengartikan *mudhrabah* dalam pengertian :

“a contract beetwen at least two parties wherwby pne party, called the investor (Rab Al-mal) entrust money to the other party called

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-maarif, 1987, h. 31

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1196

the agent-manager (*mudharib*) who is to trade with it in an agreed manner and then return to the investor the principal and a preagreed share of the profit and keep for him self what remains of such profits”⁷

Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah suatu pemberian modal (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi’i, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.

Jadi definisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai ahli maupun mazhab menurut hemat penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. Temprint, 1999, h. 29

⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta:Ull Pres, 2001, h. 47

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* tersebut hanyalah Ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dari pedagang). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah :

- a. Kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan
- b. Ucapan pernyataan
- c. Harta sebagai modal
- d. Kerja
- e. Keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

Yang terkait dengan orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

- b. Ucapan pernyataan

Ucapan yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. ucapan tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Ucapan dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi filah Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.⁹

c. Harta sebagai modal

Yang terkait dengan modal, disyaratkan :

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai
- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. Karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh *shahibul maal*, maka perjanjian mudharabah tidak sah.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Tetapi, jika modal tersebut berupa al-wadiah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mzhab Hambali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.¹⁰

d. Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa dagang (commercial). Tetapi Abu

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta:Tazkia Institute, 1999, h. 174

¹⁰Dahlan, *Ensiklopedi...*h. 1197

Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.¹¹

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- 4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

e. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat berikut :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan presentase nisbah.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, 2005, h. 104

- 3) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas maka, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut :

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah dalam *Syarhul Kabir* menyatakan: “keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua”. Lalu dijelaskan dengan pernyataan: “maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam *mudharabah* murni.” Ibnu Mundzir menyatakan: “para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal $\frac{1}{3}$ keuntungan $\frac{1}{2}$ atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk presentase.”
- 2) Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor) Ibnu Qudamah menyatakan:” diantara syarat sah *mudharabah* adalah penentuan bagian pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: ambil harta ini secara *mudharabah* dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka

keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauro, Al Syafi'i, Ishaaq, Abu Tsaur dan Aahhab Al Ra'i (Hanafiyah). “Beliaupun merajihkan pendapat ini.

- 3) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.
- 4) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua belah pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: “keuntungan jika tampak dalam *mudharabah*, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.

3. Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu :
Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah Muqayaddah.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salaf ash Shalih sering dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

a. *Mudharabah Muqayaddah*

Mudharabah muqayaddah atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* memasuki dunia usaha.¹²

4. Landasan Hukum *Mudharabah*

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang.¹³ Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat berikut ini :

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Muzzamil (73): 20:

وَأَخْرَوْا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. “ (Q.S. 73:20)

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 151

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikloprdia...*h. 1196

Q.S. Al-Jumuah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. 62:10)

Q.S. Al-Baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“ Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.” (Q.S. 2: 198)